



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SENIN, 2 JULI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Bendahara BPBD RL Diperiksa

**Dijadwalkan Hari Ini,
Terkait Korupsi DTT**

CURUP - Mantan Bendahara BPBD Kabupaten Rejang Lebong (RL) Mustafa Lutfi, hari ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong (RL). Pemeriksaan ini sesuai janji penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus), terkait lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Tak Terduga (DTT) di Sekretariat Kabupaten (Setkab) RL tahun 2011 lalu yang nilai anggarannya mencapai Rp 2,5 miliar.

Kajari RL Edi Utama, SH, MH melalui Kasi Pidsus Galuh Bastoro Aji, SH, MH kepada RB membenarkan hal tersebut. Mereka sudah menjadwalkan pemeriksaan mantan pengelola keuangan di BPBD RL sebagai saksi

dalam penyidikan kasus dugaan korupsi DTT TA 2011. "Untuk besok (hari ini, red) kita jadwalkan mantan bendaharanya dulu, yaitu Mustafa Lutfi," terang Galuh.

Setelah pemeriksaan terhadap mantan bendahara, sambung Galuh, mereka akan menjadwalkan pemeriksaan untuk Mantan Kepala BPBD Kabupaten RL yang menjabat saat itu, yaitu Masdar Helmi. Dimana saat ini diketahui Masdar Helmi menjabat sebagai Kadis Nakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Serta satu saksi lagi, yaitu Afrizal selaku Pengelola Teknis kegiatan yang menggunakan anggaran dari bantuan DTT TA 2011 lalu.

Ditambahkan Galuh, dari hasil penyidikan, diketahui ada DTT yang diberikan kepada BPBD Kabupaten RL dan digunakan untuk kegiatan fisik

sebanyak 7 item pekerjaan. Masing-masing untuk pemasangan pelapis, penahan, beronjong di Taba Renah-Air Dingin Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR) senilai Rp 92.700.000, Rehap dan Rekon Infrastruktur jalan Taba Renah-Dataran Tapus senilai Rp 90.741.000 dan kegiatan rehap dan rekon infrastruktur jalan Sopyonyo senilai Rp 59.091.000.

Serta, sambung Galuh, untuk kegiatan Rehap Rekon Infrastruktur Jalan Sapta Marga senilai Rp 227.273.000 dan kegiatan rehap rekon infrastruktur Jalan Beringin 3 senilai Rp 152.436.000. Selanjutnya kegiatan rehap rekon infrastruktur irigasi Air Tik TA-Simpang Macang senilai Rp 72.727.000 dan rehap rekon infrastruktur irigasi Air Putih-Kali Bandung senilai Rp 74.547.000.

"Total keseluruhan lebih kurang

tujuh ratus juta rupiah lebih. DTT yang digunakan oleh BPBD RL tersebut diduga kuat diduga tidak sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan turunannya Perda RL Nomor 05 tahun 2007 tentang penggunaan pengelolaan keuangan daerah," imbuh Galuh.

Untuk diketahui, DTT TA 2011, dalam APBD nilainya mencapai Rp 3 miliar dan mengalami pengurangan pada APBD Perubahan TA 2011 atau menjadi Rp 2,5 miliar. Diakhir TA 2011 atau saat tutup buku, diketahui anggaran tersebut terserap hingga Rp 2,3 miliar. Namun dari hasil temuan BPK RI atas hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah di RL tahun 2011, diduga Rp 1,474 miliar dari realisasi tidak sesuai ketentuan. (dtk)